

# EVALUASI DAN DESAIN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI KINERJA SUBDINAS PERPAJAKAN PADA PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) CABANG TANJUNG PERAK

Anindya Retno Wardhani<sup>1</sup>  
A.A Gde Satia Utama<sup>2</sup>

## ABSTRACT

*Branch of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in Tanjung Perak is one of the institution body that appointed by the Government to carry out the collection and remittance of WAPU VAT according to PMK No. 85 / PMK.03 / 2012 (amended by PMK No. 136 / PMK.03 / 2012). WAPU VAT collection and deposit system are inefficient because it requires a lot of time and effort when it comes to input the data entry of tax invoice, printing Tax Deposit and sent it to Bank Perception. Three steps activities need to be done more than once. Therefore, Branch of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in Tanjung Perak need the collection and remittance of the WAPU VAT system that sufficient to improve the efficiency of tax suboffices performance. This research aims to design the accounting information system for collecting and depositing process WAPU VAT. WAPU VAT Deposit using e-tax payment application are expected to overcome the problems that will arise in the WAPU VAT system deposit. Exploratory qualitative approach with case study method chosen in order to dig up the real problem occurs and find a solution. This research are expected to contribute significantly towards Branch of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) in Tanjung Perak as a research subject. In addition, the implementation of draft e-tax application payment system are expected to improve efficiency process of collection and remittance of WAPU VAT.*

**Keyword :** *System design, wapu VAT, efficiency, e-tax payment*

## ARTICLE INFO

### Article History :

Received 23 August 2016

Accepted 23 October 2016

Available online 25 November 2016

Page | 37

## 1. Pendahuluan

Sejak diberlakukannya PMK nomor 85/PMK.03/2012 tanggal 1 Juli 2012, terdapat kewajiban PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak untuk memungut dan menyetor PPN WAPU, tetapi ada beberapa kendala yang dialami antara lain : rekanan tidak melampirkan surat setoran pajak, rekanan terlambat menyerahkan faktur pajak ke subdinas perpajakan, terjadi kesalahan penyetoran.

<sup>1</sup> Corresponding author : Mahasiswa Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No. 4 Surabaya.  
Telp. (031) 5033642, (031) 5036584  
Email : [whardani.retno@gmail.com](mailto:whardani.retno@gmail.com)

<sup>2</sup> Corresponding author : Dosen PDD Universitas Airlangga, Jl. Wijaya Kusuma, No. 113 Banyuwangi  
Telp. (0333) 417788, 0817339278, 08113423795  
Email : [gde.agung@feb.unair.ac.id](mailto:gde.agung@feb.unair.ac.id)

Pekerjaan yang dilakukan subdinas perpajakan terkait pemungutan dan penyetoran PPN WAPU dinilai kurang efisien karena harus melakukan rekap faktur, pembukuan faktur, pencetakan SSP, penyetoran PPN ke Bank yang dilakukan berulang kali, penarikan data untuk pelaporan SPT. Hal ini mendorong subdinas perpajakan untuk melakukan efisiensi dalam hal penghematan waktu dan tenaga dengan cara merancang sistem untuk menyimpan database faktur pajak sehingga tidak membutuhkan pengentrian berulang kali dan menggunakan sistem pembayaran dengan e-tax payment sehingga tidak perlu melakukan pencetakan SSP dan pembayaran pajak tidak perlu lagi dilakukan ke bank.

Sejak diberlakukannya PMK nomor 85/PMK.03/2012 tanggal 1 Juli 2012, terdapat kewajiban PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak untuk memungut dan menyetor PPN WAPU, tetapi ada beberapa kendala yang dialami antara lain : rekanan tidak melampirkan surat setoran pajak,, rekanan terlambat menyerahkan faktur pajak ke subdinas perpajakan, terjadi kesalahan penyetoran. Pekerjaan yang dilakukan subdinas perpajakan terkait Pemungutan dan Penyetoran PPN WAPU dinilai kurang efisien karena harus melakukan rekap faktur, pembukuan faktur, pencetakan SSP, penyetoran PPN ke Bank yang dilakukan berulang kali, penarikan data untuk pelaporan SPT. Hal ini mendorong subdinas perpajakan untuk melakukan efisiensi dalam hal penghematan waktu dan tenaga dengan cara merancang sistem untuk menyimpan database faktur pajak sehingga tidak membutuhkan pengentrian berulang kali dan menggunakan sistem pembayaran dengan e-tax payment sehingga tidak perlu melakukan pencetakan SSP dan pembayaran pajak tidak perlu lagi dilakukan ke bank.

Evaluasi dan Desain Sistem Informasi Akuntansi yang seperti apa yang akan dibuat dalam mengatasi kendala dan meningkatkan efisiensi kinerja subdinas perpajakan ?. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendesain sistem informasi akuntansi untuk proses pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut sehingga dapat meningkatkan efisiensi kinerja subdinas perpajakan di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai.

### 2.2 Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Pada tanggal 6 Juni 2012 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

PPN atau PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada BUMN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN. Rekanan merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada BUMN.

PPN atau PPnBM yang terutang, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Rekanan wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada BUMN, yang harus dibuat pada saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan. Pemungutan PPN atau PPnBM dilakukan pada saat bersamaan dengan pembuatan faktur pajak.

BUMN wajib menyetorkan PPN atau PPnBM yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat BUMN terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan SPT PPN bagi pemungut PPN. Dan dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan SSP.

### **2.3 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran**

Tata cara pemungutan dan penyetoran setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya adalah sebagai berikut :

1. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN.
2. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
3. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, dan penandatanganan SSP tersebut dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama Rekanan.
4. Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka Rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
5. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan sebagai berikut :
  - a. Lembar kesatu untuk BUMN; dan
  - b. Lembar kedua untuk Rekanan.
6. SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
  - a. Lembar kesatu untuk Rekanan;
  - b. Lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
  - c. Lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN; dan
  - d. Lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
7. BUMN yang melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM harus membubuhkan cap "Disetor Tanggal....." dan menandatangani pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5.
8. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.

## 2.4 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem adalah serangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan (Romney, 2012:2). SIA terdiri dari lima komponen (Romney, 2012:3) :

1. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
2. Prosedur-Prosedur, baik manual maupun yang terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi.
3. Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
4. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung (*peripheral device*), dan peralatan untuk komunikasi ringan.

SIA dapat menambah nilai bagi organisasi dengan cara memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu, agar kelima aktivitas utama rantai nilai dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. SIA yang dirancang dengan baik dapat melakukan hal ini dengan cara (Romney, 2012:11) :

1. Memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa.
2. Memperbaiki efisiensi.
3. Memperbaiki pengambilan keputusan
4. Berbagi pengetahuan

Data mengarah pada fakta-fakta yang kita kumpulkan, simpan, dan proses dengan sistem informasi, sedangkan informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti. Karakteristik informasi yang berguna (Romney, 2012:12) :

1. Relevan  
Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, memperbaiki kemampuan pengambil keputusan untuk membuat prediksi, mengkonfirmasi atau memperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya.
2. Andal  
Informasi itu andal jika bebas dari kesalahan atau penyimpangan, dan secara akurat mewakili kejadian atau aktivitas di organisasi.
3. Lengkap  
Informasi itu lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang diukurnya.
4. Tepat Waktu  
Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan pengambil keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan.
5. Dapat dipahami  
Informasi dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan jelas.
6. Dapat diverifikasi  
Informasi dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan yang baik, bekerja secara independen dan masing-masing akan menghasilkan informasi yang sama.

SIA suatu organisasi memainkan peranan penting dalam membantu organisasi mengadopsi dan mempertahankan posisi strategis. Mencapai kesesuaian yang baik antar aktivitas membutuhkan pengumpulan data tiap aktivitas. Hal lain yang juga penting adalah sistem informasi harus mengumpulkan dan mengintegrasikan baik data keuangan, maupun non keuangan dari aktivitas-aktivitas organisasi (Romney, 2012:17).

## 2.5 Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem adalah suatu jenis pemecahan masalah yang terstruktur dengan aktivitas yang jelas. Aktivitas-aktivitas ini terdiri atas analisis sistem, perancangan sistem, pemrograman, pengujian, konversi, serta produksi dan pemeliharaan (Laudon, 2012:208).

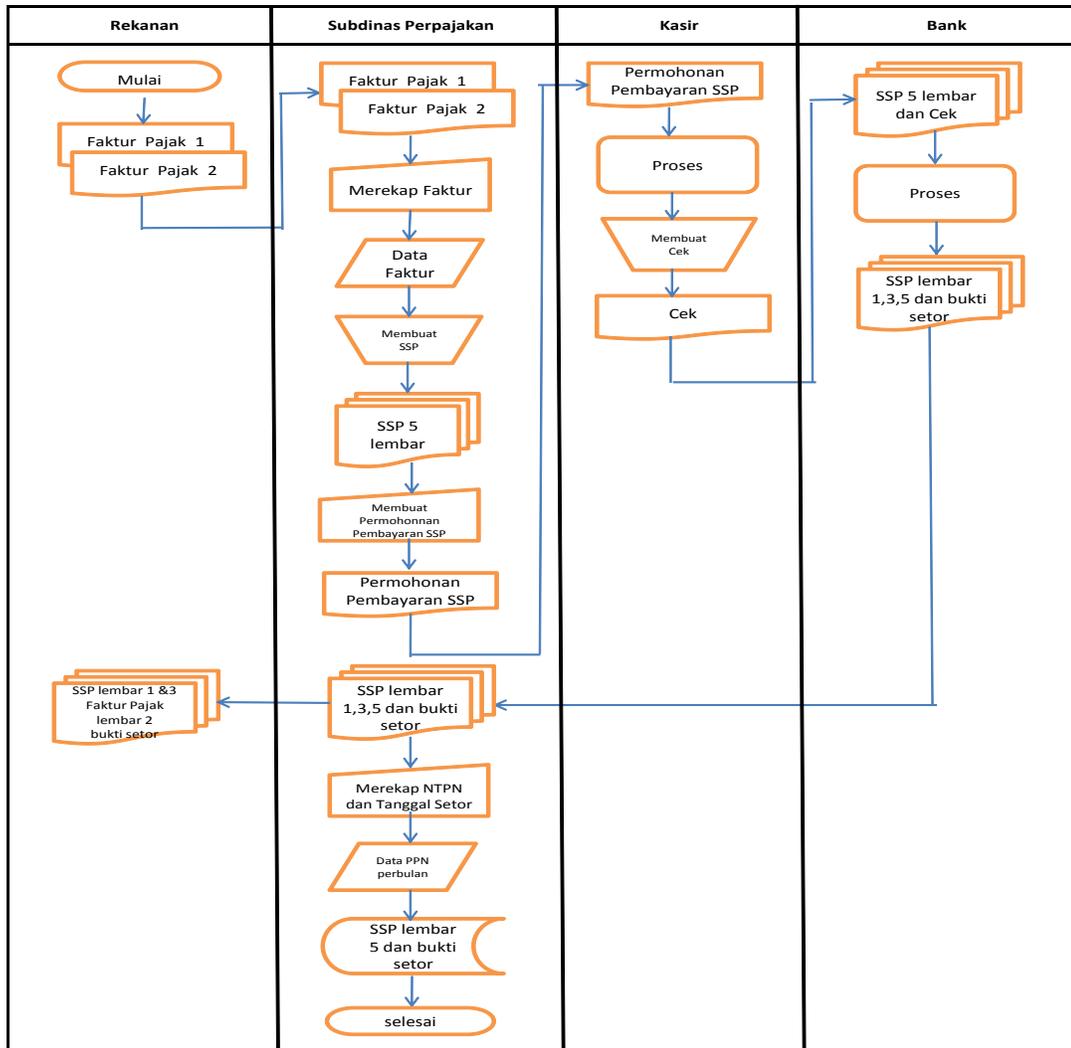
- a) Analisis Sistem  
Adalah analisis masalah yang dicoba diselesaikan perusahaan dengan sistem informasi. Tahap ini terdiri atas pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, pencarian solusi, dan identifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh suatu solusi sistem.
- b) Perancangan Sistem  
Menjelaskan spesifikasi sistem yang akan melakukan fungsi-fungsi yang diidentifikasi pada saat analisis sistem. Spesifikasi ini harus menangani semua komponen manajerial, organisasional, dan teknologi dari solusi sistemnya.
- c) Pemrograman  
Spesifikasi sistem yang disiapkan selama perncangan diterjemahkan ke dalam kode program.
- d) Pengujian  
Pengujian yang mendalam dan seksama harus dilakukan untuk mengetahui apakah sistem memberikan hasil-hasil yang benar. Pengujian sistem menguji sistem informasi secara keseluruhan. Uji penerimaan memberikan sertifikasi akhir bahwa sistem siap digunakan dalam situasi produksi. Rencana pengujian ini mencakup semua persiapan untuk rangkaian pengujian yang baru saja dijelaskan.
- e) Konversi  
Adalah proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Empat strategi konversi yang utama dapat dilakukan : strategi paralel, strategi pindah langsung, strategi studi percontohan, dan strategi pendekatan bertahap.
- f) Produksi  
Setelah sistem yang baru dipasang dan konversinya selesai dilakukan, sistem tersebut dikatakan berada dalam kondisi produksi.
- g) Pemeliharaan  
Perubahan perangkat keras, peranti lunak, dokumentasi, atau prosedur dalam sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi kebutuhan baru, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan.

## 2.6 Konsep Efisiensi

Efisiensi terjadi karena adanya suatu kegiatan atau usaha yang dinilai oleh perusahaan/lembaga telah banyak menghabiskan sumber daya namun manfaat yang dirasakan oleh perusahaan sangatlah kecil, maka perusahaan/lembaga tersebut melakukan peninjauan kembali semua aspek yang ikut serta dalam kegiatan/usaha yang lain oleh perusahaan sehingga memberi manfaat yang besar bagi perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan sebuah metode perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan.

### 3. Pembahasan

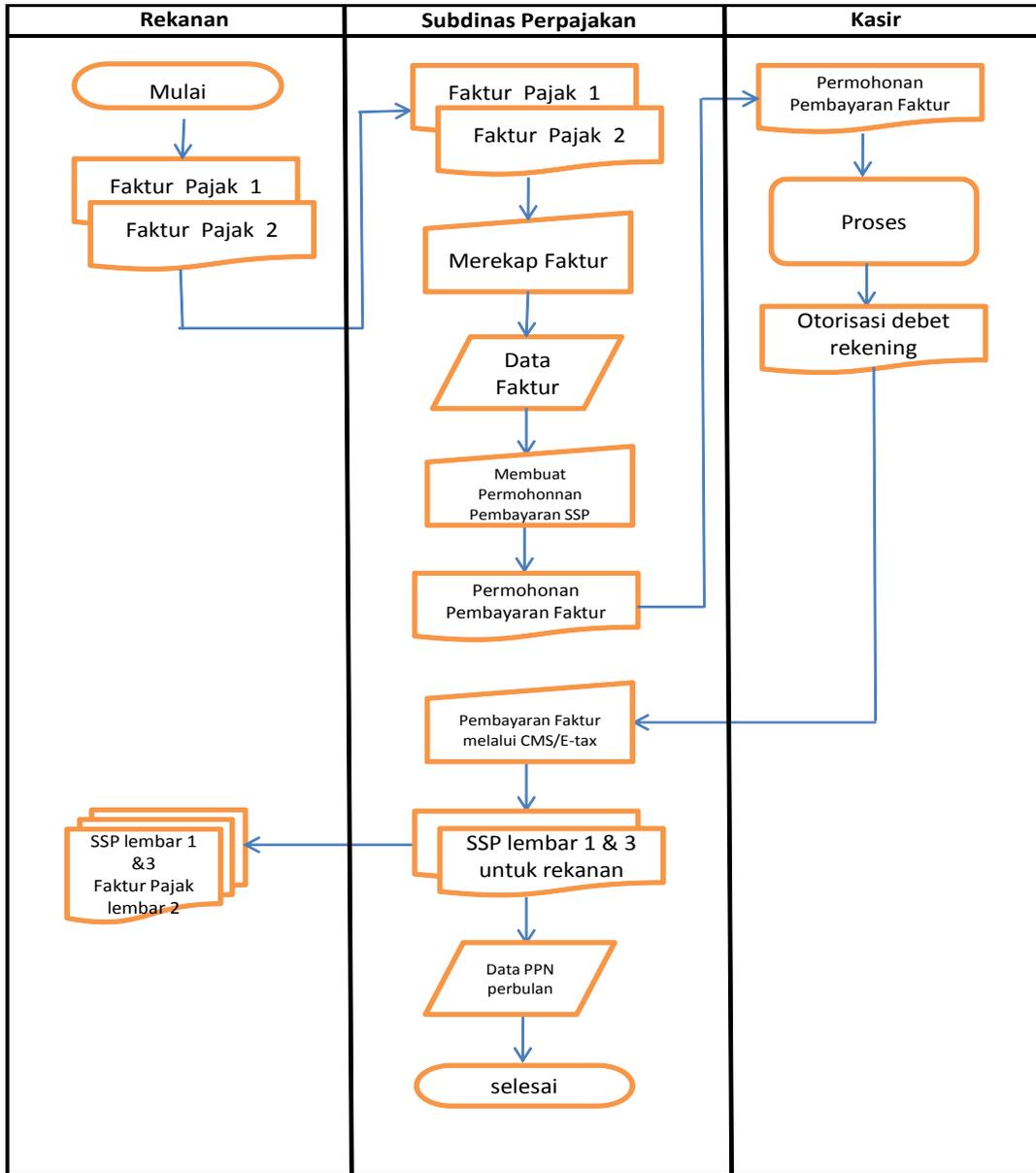
#### 3.1 Analisis Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut Saat ini



Sumber : Data Olahan, 2014

**Gambar 1. Sistem Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut (yang berlaku saat ini).**

### 3.2 Usulan Desain Sistem Pemungutan dan Penyetoran PPN WAPU pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak



Sumber : Data Olahan, 2014

**Gambar 2.** Usulan *Flowchart* untuk Prosedur Pemungutan dan Penyetoran PPN WAPU

#### 4.3 Analisis Efisiensi penggunaan *E-Tax*

Analisis efisiensi dalam setiap perusahaan perlu dilakukan agar dana meningkatkan produktifitas kinerja masing masing pegawai. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak perlu melakukan analisis pada divisi keuangan dinas akuntansi keuangan khususnya subdinas perpajakan terkait

dengan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut. Mulai pelaksanaan Peraturan Menteri Pemerintah nomor 85 tahun 2012 hingga saat ini, penyetoran PPN WAPU tersebut dinilai kurang efisien karena membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu diusulkan rancangan penyetoran PPN WAPU dengan menggunakan aplikasi *E-Tax*, sehingga subdinas perpajakan hanya perlu membuat data rekap faktur pajak, setelah itu membuat permohonan pembayaran ke kasir, setelah permohonan pembayaran diotorisasi maka subdinas perpajakan hanya perlu mengimpor data faktur pajak tersebut. Kemudian mencetak SSP dari aplikasi *E-Tax* yang kemudian diserahkan kepada rekanan beserta faktur pajak lembar kedua. Sehingga kinerja subdinas perpajakan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak bisa lebih efisien.

## 5. Kesimpulan, Saran dan Implikasi

### 5.1 Kesimpulan

1. Sistem pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut yang digunakan saat ini menyebabkan manajemen membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak karena harus menginput setiap data faktur pajak yang masuk, mencetak Surat Setoran Pajak dan menyetor ke Bank Persepsi lebih dari satu kali.
2. Dengan menerapkan *e-tax payment*, diharapkan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak mampu menghemat tenaga dan waktu, meningkatkan efisiensi kinerja subdinas perpajakan dan menghasilkan *output* berupa data faktur Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut.

### 5.2 Saran

1. Setiap divisi yang melakukan transaksi yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut, diwajibkan melakukan penyetoran faktur pajak paling lambat akhir bulan bersangkutan.
2. Manajemen PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak melakukan kerja sama dengan bank CIMB Niaga yang dapat memberikan sistem pembayaran pajak secara *online* berupa *e-tax*.

### 5.3 Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah proses evaluasi dan analisis system informasi akuntansi terkait pemngutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai wajib pungut berbasis e-payment sehingga memberikan manfaat bagi manajemen PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.*

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.*
- Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. 2010. *Pedoman Penulisan, Pembimbingan, dan Ujian Skripsi.* Surabaya: Airlangga University Press.
- Fauziah, Sifa. 2010. *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada PT Tasly World Indonesia Cabang Bandung Dengan Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan SQL Server 2000 Berbasis Client Server.* Jurnal Komputerisasi Akuntansi. ([http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/447/jbptunikompp-gdl-sifafauzia-22348-3-unikom\\_s-h.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/447/jbptunikompp-gdl-sifafauzia-22348-3-unikom_s-h.pdf) diakses pada 5 Juni 2014).
- Laudon, Kenneth C., dan Jane, P. Laudon. 2012. *Management Information System : Managing The Digital Firm.* New Jersey : Prentice Hall.
- Rizal, Qosdi.,Supriyati., dan Rio, Yunanto. 2010. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian di PT Gunungputri Agranusa Dengan Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 dan SQL Server 2000 Berbasis Client Server. *Jurnal Komputerisasi Akuntansi.* Vol. 3. No.1, Pp.1-10.
- Republik Indonesia, 2009. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*
- Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Romney, Marshall, B.,and Steinbart, Paul Jhon. 2012. *Accounting Information System.* 12Th Ed. New Jersey : Pearson Prentice Hall.
- Sukardji, Untung. 2014. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia.* Jakarta : Rajawali Pers.
- Vilanda, Ika. 2012. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Mengembangkan Efisiensi Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi.* Vol. 1. No. 2, Pp. 15-36.

- Waluyani, Risma Candra., dan Zaki Baridwan. 2012. Evaluasi dan Perancangan Desain Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penghasilan Berbasis Komputer Dengan Menggunakan Microsoft SQL Server 2005. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol 1. No. 2, Pp. 1-17.
- Wicaksono, Angki. 2015. Perancangan Sistem Akuntansi Penjualan Tunai Terkomputerisasi Pada Al Ishba Karpét. *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen Indonesia*. Vol. 1. No. 1, Pp. 30-33.
- Yin, Robert K. 2012. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.